



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

DISAMPAIKAN DALAM ACARA BIMBINGAN TEKNIS
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI

PENDAHULUAN

“

Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**.

Dasar hukum pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Mahkamah dalam penanganan perkara konstitusi sesuai kewenangannya:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 (PMK 18/2009) tentang “Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference)”

”

APA PERADILAN MODERN ITU?



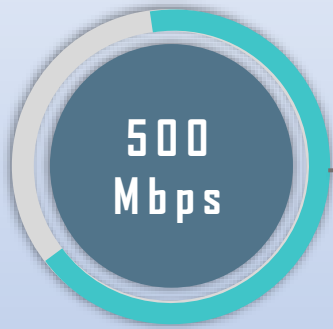
Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT (*information, communication, and technology*), memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada ICT (*integrity, clean, and trustworthy*) :

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

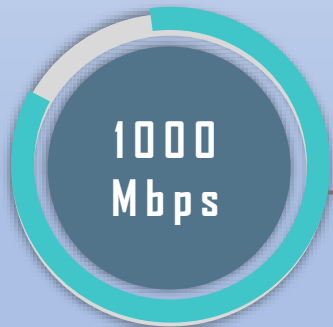
PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET DI MK



Bandwith 500 Mbps
untuk jaringan
Internasional



Bandwith 1000 Mbps
untuk jaringan
lokal



Dukungan 24/7 dari CNI dan Telkom
untuk keberlangsungan jaringan
dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



Menggunakan IP Transit agar koneksi
Always ON. Memiliki fitur untuk memilih
best path sehingga akses website menjadi
lebih cepat.

SYSTEM SECURITY DI MK

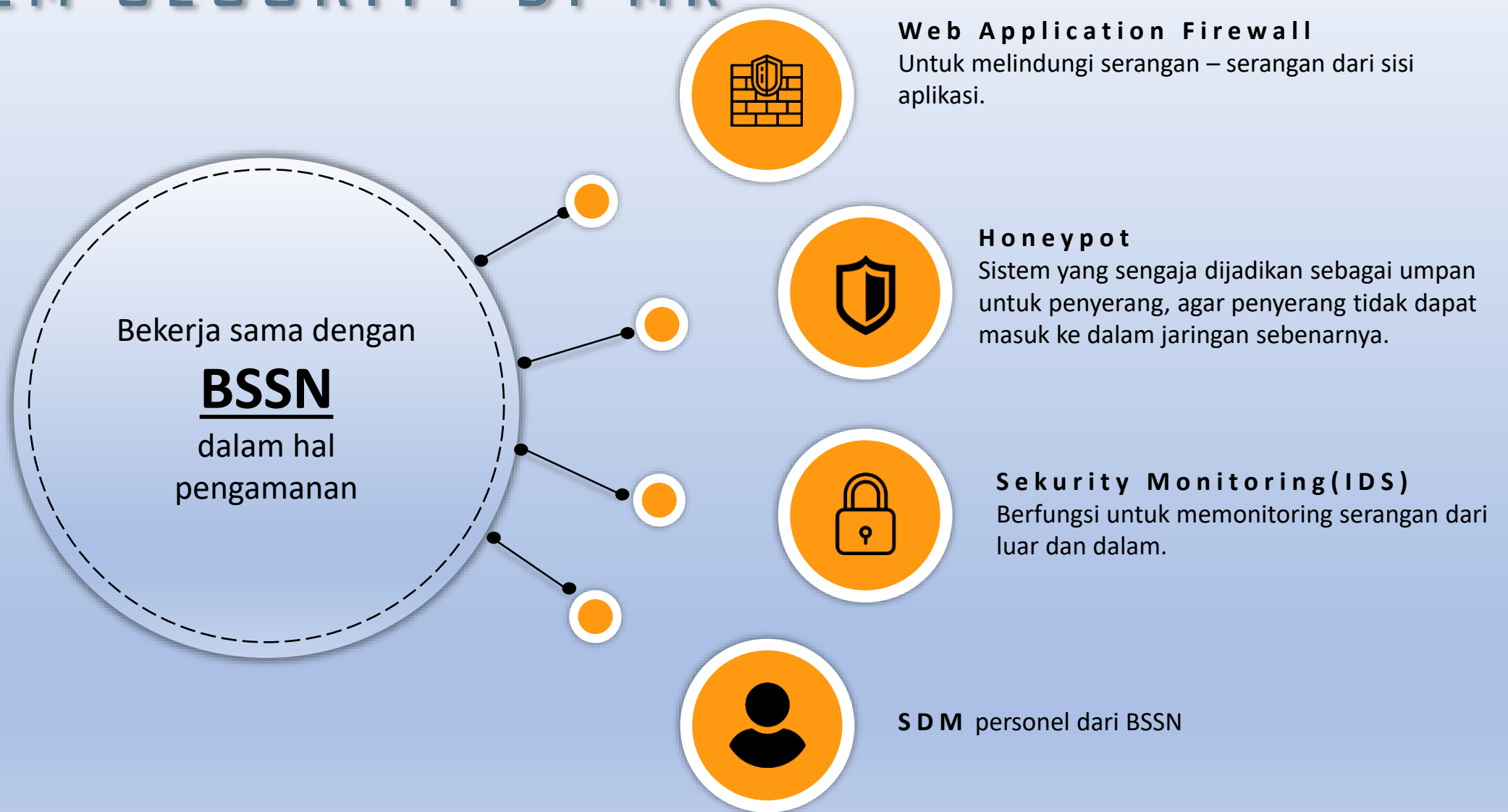
1 **PALOALTO (FIREWALL)**
Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan

3 **ANTI DDOS**
Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth

2 **IRON PORT (EMAIL SECURITY)**
Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

4 **MIRRORING SERVER**
Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup

SYSTEM SECURITY DI MK



Bekerja sama dengan

BSSN

dalam hal
pengamanan



Web Application Firewall

Untuk melindungi serangan – serangan dari sisi aplikasi.



Honeypot

Sistem yang sengaja dijadikan sebagai umpan untuk penyerang, agar penyerang tidak dapat masuk ke dalam jaringan sebenarnya.



Sekurity Monitoring (IDS)

Berfungsi untuk memonitoring serangan dari luar dan dalam.



SDM personel dari BSSN

Akses Berperkara di MK

01

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

02

Website Mahkamah Konstitusi

03

Portal Informasi Pilkada 2020

04

Persidangan Jarak Jauh dan Streaming Persidangan MK

05

Click MK

06

Case Tracking dan Case Retrieval

07

Konsultasi dan Tanya Jawab Online

08

Jadwal Sidang, Putusan dan Risalah Sidang



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“

Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (Permohonan Elektronik / *Electronic Filing*), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

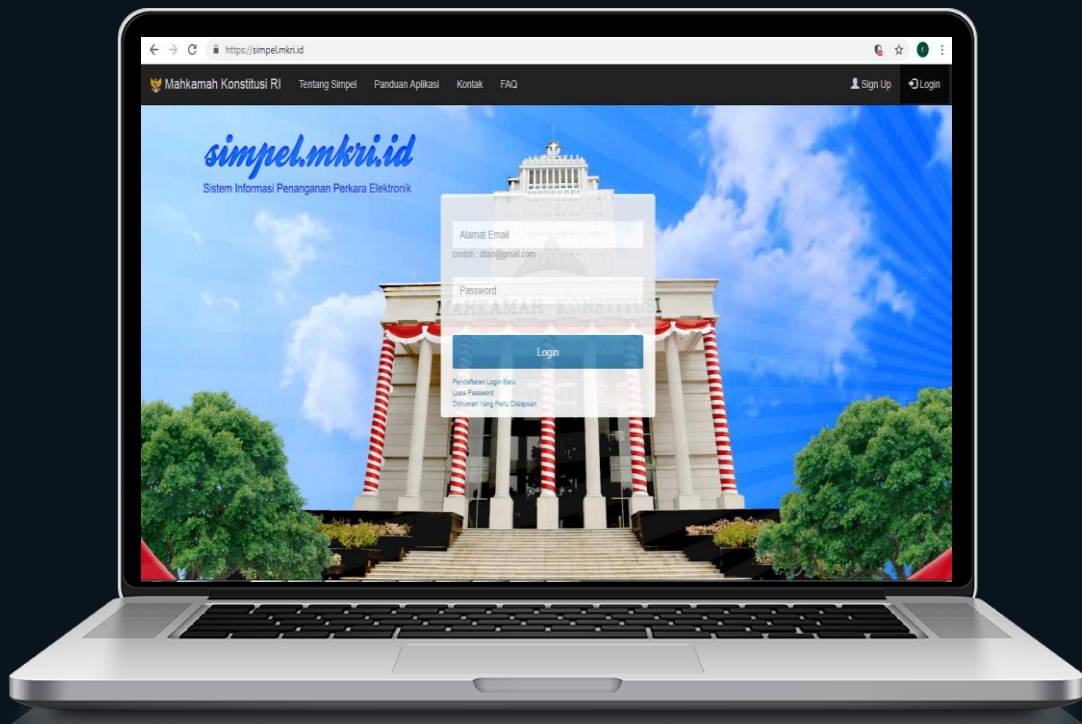
PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”

”

SIMPEL

(SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

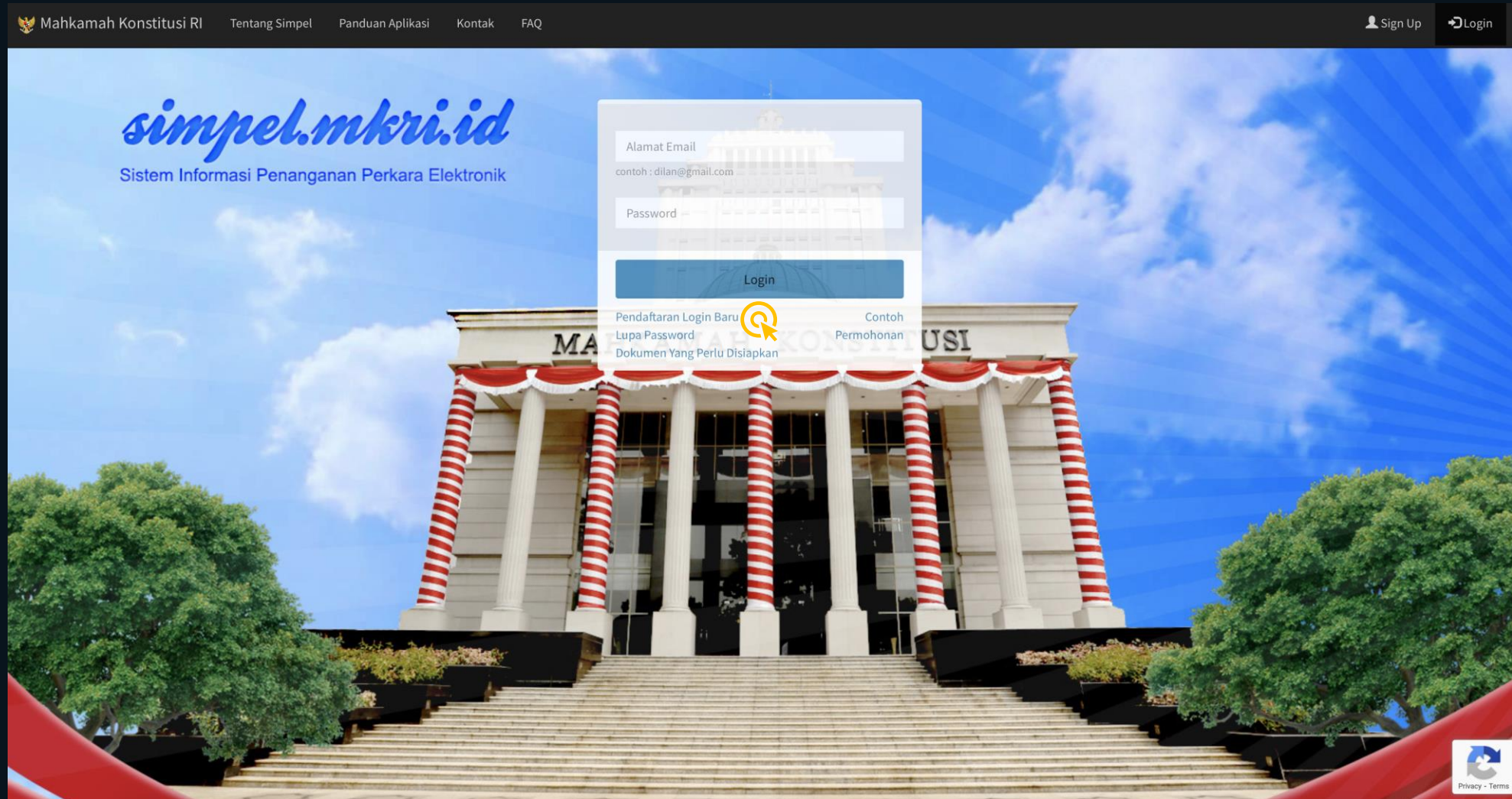
PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

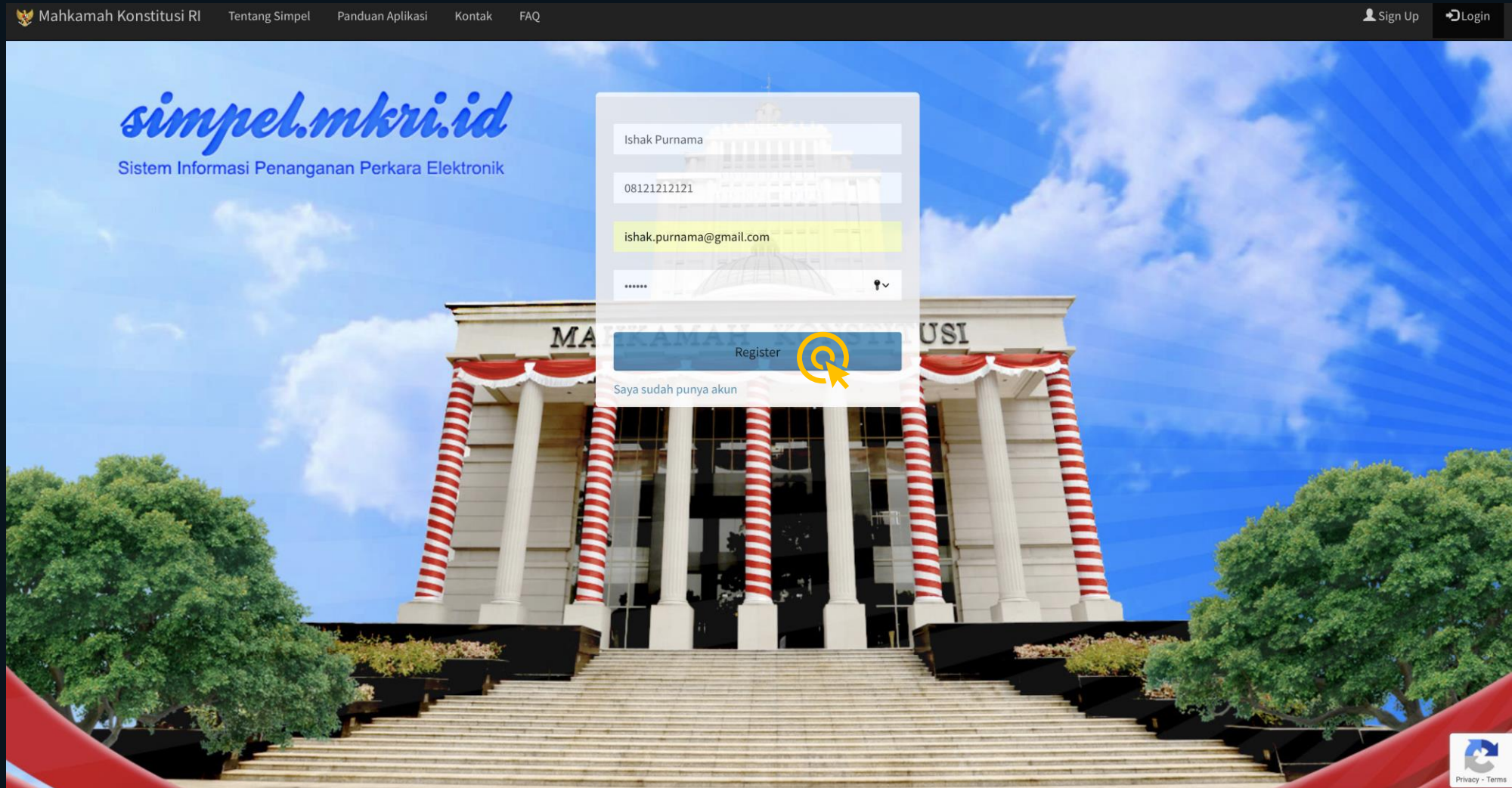
Permohonan Online (E-Perkara) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui E-Perkara, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



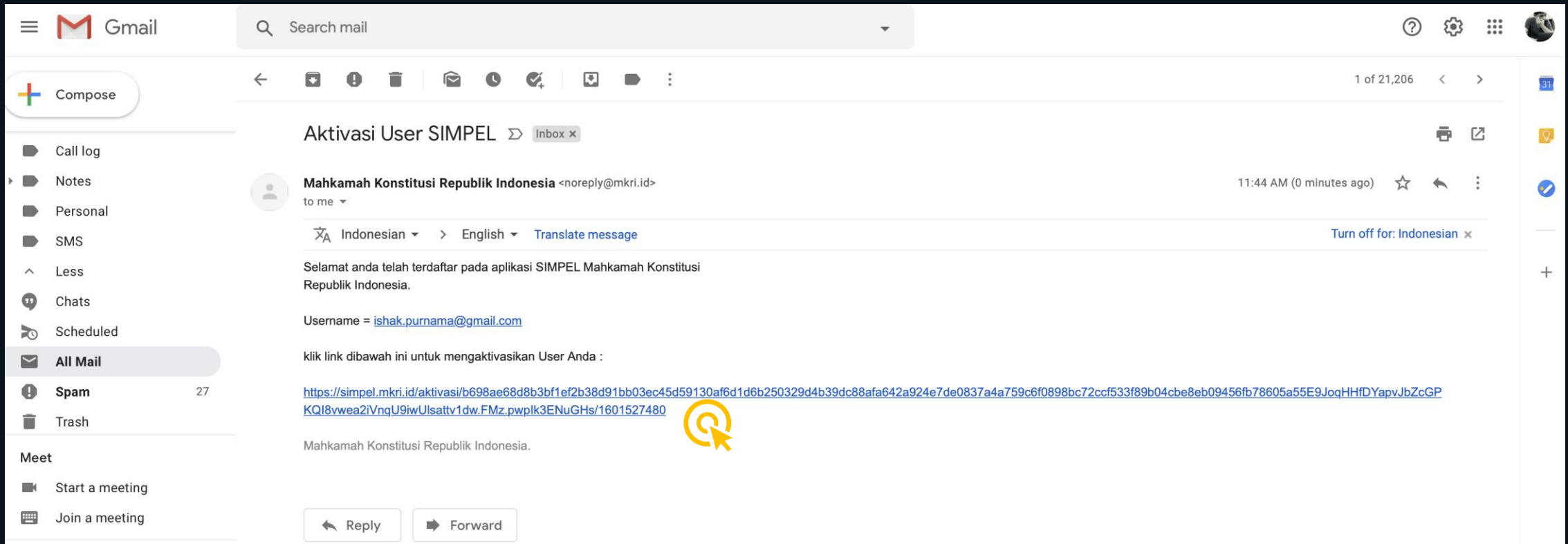
Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



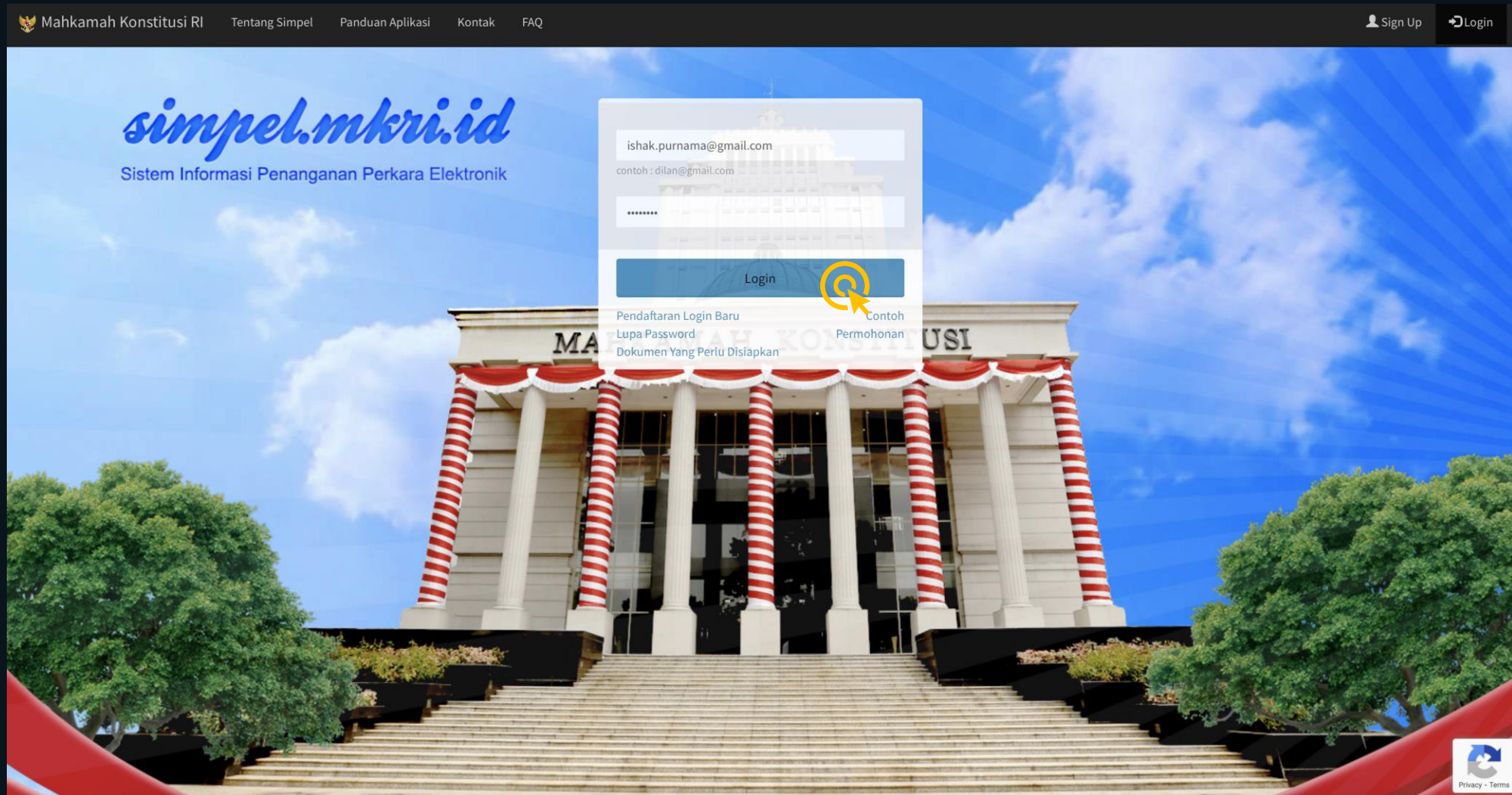
Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”. Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Setelah akun sudah teraktivasi selanjutnya masukkan alamat email dan password pada halaman login untuk masuk kedalam aplikasi simpel

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the user profile page on the SIMPEL.MKRI.ID website. The user is logged in as 'Ishak Purnama' and the page is titled 'Profil Pemohon'. The profile information is as follows:

Field	Value
Nama	Ishak Purnama
Email	ishak.purnama@gmail.com
Password	Password Baru
Nomor Telepon	081210471812
Nomor KTP *	
File KTP *	Choose File no file selected File type harus .jpg .gif atau .png Belum ada file KTP

Setelah login untuk pertama kali, user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun. Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the SIMPEL (DEV) dashboard interface. The top navigation bar includes the SIMPEL (DEV) logo, a user profile for Ishak Purnama, and a notification bell. The left sidebar contains a menu with options: Dashboard, PUU, SKLN, PPHU, PHP Kepala Daerah, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Konsultasi. The main content area is titled 'SIMPEL.MKRI.ID' and features a 'Permohonan' section with four cards: 'Penguji Undang-Undang (PUU)', 'Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)', 'Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden', and 'Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR-DPRD-DPD)'. Below this is a 'Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah' section with a card for 'PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota'. At the bottom, there is a 'Kalender Sidang' widget showing a calendar for October 2020.

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PPHU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot shows the SIMPEL (DEV) web interface. The top navigation bar includes the SIMPEL (DEV) logo, a user profile for Ishak Purnama, and a notification bell. The main header displays 'Permohonan Online' for PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota, with a breadcrumb trail: Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PHPKADA. The interface is divided into three process stages: 'Proses Pengisian Pokok Permohonan' (highlighted in green), 'Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa', and 'Proses Upload Dokumen'. A dropdown menu for 'Pemilihan Kepala Daerah' is set to 'Silahkan Pilih'. Below this is a 'Permohonan' section with a text area for 'Uraian Pokok Permohonan'. A red-bordered box highlights the 'Dokumen yg harus disiapkan:' section, which lists the following requirements: KTP Pemohon (dalam format .jpg), Email Pemohon, KTP Kuasa (dalam format .jpg) **, Email Kuasa **, Surat Kuasa (dalam format .pdf) **, File KTA/BAS (bagi advokat) **, Permohonan (dalam format .pdf), and Permohonan (dalam format .doc/.docx). A note below states: 'Keterangan: ** Jika menggunakan kuasa pemohon'. At the bottom, there are 'Simpan' and 'Batal' buttons.

Untuk mengajukan permohonan PHP Kepala Daerah. Ikuti proses yang dipandu dalam penginputan form permohonan, kemudian nanti setelah selesai submit dan sukses maka akan diarahkan ke halaman status permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

SIMPEL (DEV) Ishak Purnama Online

Informasi PHPKADA PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Dashboard > Informasi phpkada

Permohonan

No	Nomor	Permohonan	Pemohon / Kuasa	Status	#
1	No Online: /PAN.ONLINE/2020 (01 Oktober 2020, Pkl. 13:54 WIB)	Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020	Pemohon: <ul style="list-style-type: none">H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D.H. UU Ruzhanul Ulum, S.E. Tidak menggunakan kuasa	Menunggu diproses Kapaniteraan	

Kamis, 01 Oktober 2020
13:54:38

Halaman informasi permohonan menunjukkan status permohonan yang telah di submit. Untuk mencetak TTPO dan dokumen akta-akta dengan menekan tombol status.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

The screenshot displays the SIMPEL (DEV) web application interface. The top navigation bar includes the SIMPEL (DEV) logo, a user profile for Ishak Purnama, and a notification bell. The main header shows the application title 'Informasi PHPKADA' and the user's name 'Ishak Purnama'. The left sidebar contains a menu with options like Dashboard, PUU, SKLN, PHPU, PHP Kepala Daerah, Info Permohonan, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Konsultasi. The main content area is titled 'Permohonan PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota' and shows a status message 'Menunggu diproses Kepaniteraan'. Below this, the application details are listed: 'Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020' and 'Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020 (01 Oktober 2020, Pkl. 13:54 WIB)'. A 'Data Pemohon' table lists two applicants. Finally, a 'Berkas Permohonan' table lists the required documents for the application.

Informasi PHPKADA PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Dashboard > Informasi PHPKADA

Permohonan PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menunggu diproses Kepaniteraan

Pokok Permohonan : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020 (01 Oktober 2020, Pkl. 13:54 WIB)

TTPPO

Data Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP
1	H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D.	Bekasi	1212121212121211	ishak.purnama@gmail.com	-	081210471812
2	H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.	Bekasi	1212212121212121	ishak.purnama@gmail.com	081210471812	081210471812

Berkas Permohonan

NO	Nama Berkas	Keterangan	#
1	Permohonan	File Permohonan	
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	File Daftar Alat / Dokumen Bukti	
3	Alat Bukti	File Alat Bukti	
4	SK KPU	File SK KPU	

Halaman detail informasi permohonan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*


Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

Jadwal Sidang: Penentuan Tempat Duduk Sidang

 SIMPEL ishak.purnama4@gmail.com

Kunjungan Sidang Jadwal Sidang Dashboard > > Kunjungan Sidang > > Jadwal Sidang

Jadwal Sidang Pemohon

#	WAKTU SIDANG	NOMOR PERKARA	ACARA SIDANG	KEHADIRAN
1	2018-09-26, 13:30 WIB	61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan	Kehadiran

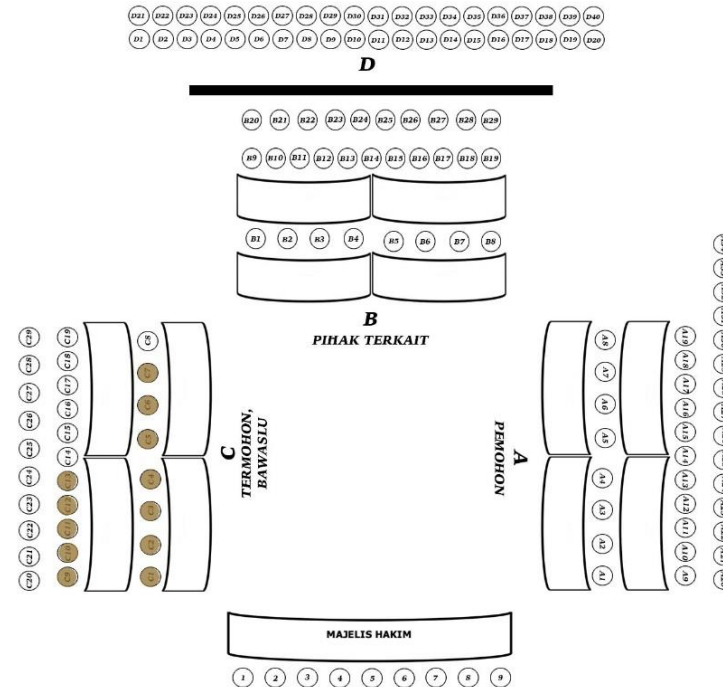
Kamis, 4 Oktober 2018
14:06:58

List jadwal sidang untuk menentukan tempat duduk sidang

Penentuan Tempat Duduk Sidang

Jadwal Sidang

Nomor Perkara	Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang	Lokasi
61/PHP.BUP-XVI/2018	Pengucapan Putusan		26-09-2018	13:30	PANEL 3



Denah ruang sidang



WEBSITE MK



Dapat diakses di www.mkri.id



MENU WEBSITE

Rabu, 07 Oktober 2020

English

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM



PUTUSAN

RISALAH

IKHTISAR

ANOTASI

Selasa, 29 September 2020 | 11:46 WIB

Nomor Perkara : 78/PUU-XVII/2019

Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Selasa, 29 September 2020 | 10:47 WIB

Nomor Perkara : 53/PUU-XVIII/2020

Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya

PROTOKOL KESEHATAN KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1 WAJIB MENGENAKAN MASKER
- 2 PEMERIKSAAN SUHU BADAN
- 3 MENCUCI TANGAN DENGAN SABUN ATAU HAND SANITIZER
- 4 MENEKAN TOMBOL LIFT TIDAK DENGAN JARI TANGAN
- 5 MEMATUHI KAPASITAS LIFT HANYA EMPAT ORANG

- 6 PRESENSI MASUK DAN PULANG KERJA MENGGUNAKAN APLIKASI ONLINE
- 7 MENYAPA REKAN KERJA TANPA KONTAK FISIK
- 8 MENJAGA KEBERSIHAN AREA KERJA
- 9 RAPAT DILAKUKAN DENGAN MENJAGA JARAK
- 10 BERIBADAH MENGGUNAKAN PERALATAN Masing-masing

- 11 MENJAGA JARAK SAAT MAKAN PADA WAKTU ISTIRAHAT
- 12 MENJAGA DAN MEMASTIKAN LINGKUNGAN SELALU BERSIH
- 13 SELAMA PERJALANAN PULANG DARI KANTOR TETAP MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN
- 14 MENGUBAH POLA HIDUP LEBIH BERSIH, LEBIH SEHAT, DAN LEBIH BAIK

officialMKR officialMKR MahkamahKonstitusi Mahkamah Konstitusi RI

www.mki.id

... Pengumun

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

PILKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG - UNDANG

PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

Rabu, 07 Oktober 2020

English

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM



PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 September 2020 | 11:46 WIB

Nomor Perkara : 78/PUU-XVII/2019

Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Selasa, 29 September 2020 | 10:47 WIB

Nomor Perkara : 53/PUU-XVIII/2020

Amar Putusan : Menyatakan Permohonan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya



Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 ::: Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2020

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

BERITA SIDANG

BERITA NON SIDANG

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

PILKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG - UNDANG

JADWAL SIDANG

Selengkapnya

esia TA 2020. ...

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 2	2	3	4
5 4	6 2	7 3	8 7	9	10	11
12 3	13 3	14 4	15	16	17	18
19	20 2	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keduanya (Purple), Libur (L) (White)



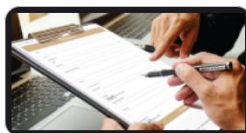
Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran



Konsultasi

BERITA SIDANG BERITA NON SIDANG INFO PUBLIK PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (MK) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC



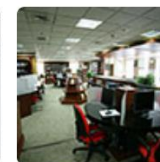
LPSE MKRI



JDIH



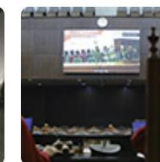
Gedung MK



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

si Tahun 2020 ::: Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Dewan Etik Hakim Konstitusi Periode 2020 - 2023. ::: Pengumuman Hasil Review Penilaian Tahap II Penelitian Kompetitif Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev **2020 Oktober** Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 ²	2	3	4
5 ⁴	6 ²	7 ³	8 ⁷	9	10	11
12 ³	13 ³	14 ⁴	15	16	17	18
19	20 ²	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang
■ Putusan
■ Keduanya
Ⓛ Libur

BERITA SIDANG **BERITA NON SIDANG** **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB
Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan
 Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (MK) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB
UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK
 Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

[+ Berita Sidang](#)

PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

 Hakim Konstitusi	 Putusan	 Simpel.mkri.id	 Penelusuran Perkara
 Pusdik MKRI	 AACC	 LPSE MKRI	 JDIH

 Siaran Pers	 Pengumuman
 Informasi Anggaran	 Konsultasi

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

PROTOKOL KESEHATAN KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI

0:00 / 2:41

 Gedung MK	 Perpustakaan	 Pusat Sejarah Konstitusi	 Streaming dan Video Conference
 Putusan Landmark	 Majalah Konstitusi	 Jurnal Consrev	 Jurnal Konstitusi

PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

Tentang Pendidikan Tinggi Terhadap Uud 1945

Selengkapnya

... (download) secara gratis ::: Pengumuman Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Keganiteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2020

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

2020 Oktober						
Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang ■ Putusan ■ Keduanya (L) Libur



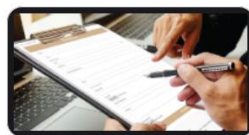
Siaran Pers



Pengumuman



INFORMASI ANGGARAN



BERITA SIDANG BERITA NON SIDANG INFO PUBLIK PUBLIKASI

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (MK) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



PILKADA SERENTAK 2020 PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Simpel.mkri.id



Penelusuran Perkara



Pusdik MKRI



AACC



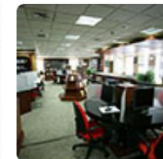
LPSE MKRI



JDIH



Gedung MK



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Streaming dan Video Conference



Landmark Decision



KONSTITUSI Saran & Konvensional Internasional



Constitutional Review



JURNAL KONSTITUSI

MENU DAN PORTAL PILIHAN

Prev 2020 Oktober Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	1 ²	2	3	4
5 ⁴	6 ²	7 ³	8 ⁷	9	10	11
12 ³	13 ³	14 ⁴	15	16	17	18
19	20 ²	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

■ Sidang ■ Putusan ■ Keduanya (L) Libur



Siaran Pers



Pengumuman



Informasi Anggaran



Konsultasi

Rabu, 07 Oktober 2020 | 18:23 WIB

Sidang Uji UU Minerba: DPR dan DPD Berhalangan, Pemerintah Minta Penundaan

Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk) Menunda Pelaksanaan Sidang Pleno Terhadap Tiga Perkara

Rabu, 07 Oktober 2020 | 07:09 WIB

UU Minerba Dituding Persempit Peran BUMN dan BUMD atas IUPK

Jakarta, Humas Mkri -Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

+ Berita Sidang

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



2020 UNDANG - UNDANG

Hakim Konstitusi	Putusan	Simpel.mkri.id	Penelusuran Perkara
Pusdik MKRI	AACC	LPSE MKRI	JDIH
Gedung MK	Perpustakaan	Pusat Sejarah Konstitusi	Streaming dan Video Conference
Putusan Landmark	Majalah Konstitusi	Jurnal Consrev	Jurnal Konstitusi



2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110

TANYA JAWAB

DEWAN ETIK

HUBUNGI MK

WHISTLEBLOWING

MEDIA SOSIAL

PENGUNJUNG



Tracking Perkara

Jl. Medan Merdeka Barat No.6 - Jakarta 10110. Telp. +62-21-23529000 Fax: 021-3520177

PENELUSURAN PERKARA



MAHKAMAH KONSTITUSI

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945



Monitoring status perkara

Pelayanan Persidangan live Youtube

Link :: <https://www.youtube.com/user/mahkamahkonstitusi>

YouTube ID

mkri live

#MengawalKonstitusi
#IndonesiaMaju

BERSAMA
#MengawalKonstitusi
NEGERI

www.mkri.id

Mahkamah Konstitusi RI ✓
39,7 rb subscriber

DISUBSCRIBE

BERANDA VIDEO PLAYLIST KOMUNITAS CHANNEL TENTANG

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ▶ PUTAR SEMUA

Thumbnail	Video Title	Duration
	Diajukan Lewat Tenggang Waktu, Permohonan...	2.02
	Berbagai Keberatan Diungkap Pemohon PPHU Kab. Hulu...	1.58
	Hasil Pemilukada Aceh Barat Digugat	1.56
	MK Tolak Seluruh Permohonan Sengketa PSU...	1.46
	MK: Tonny-Frans, Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kep. Yape...	2.02
	Pihak Termo Tanggapi Da...	747 x ditonton

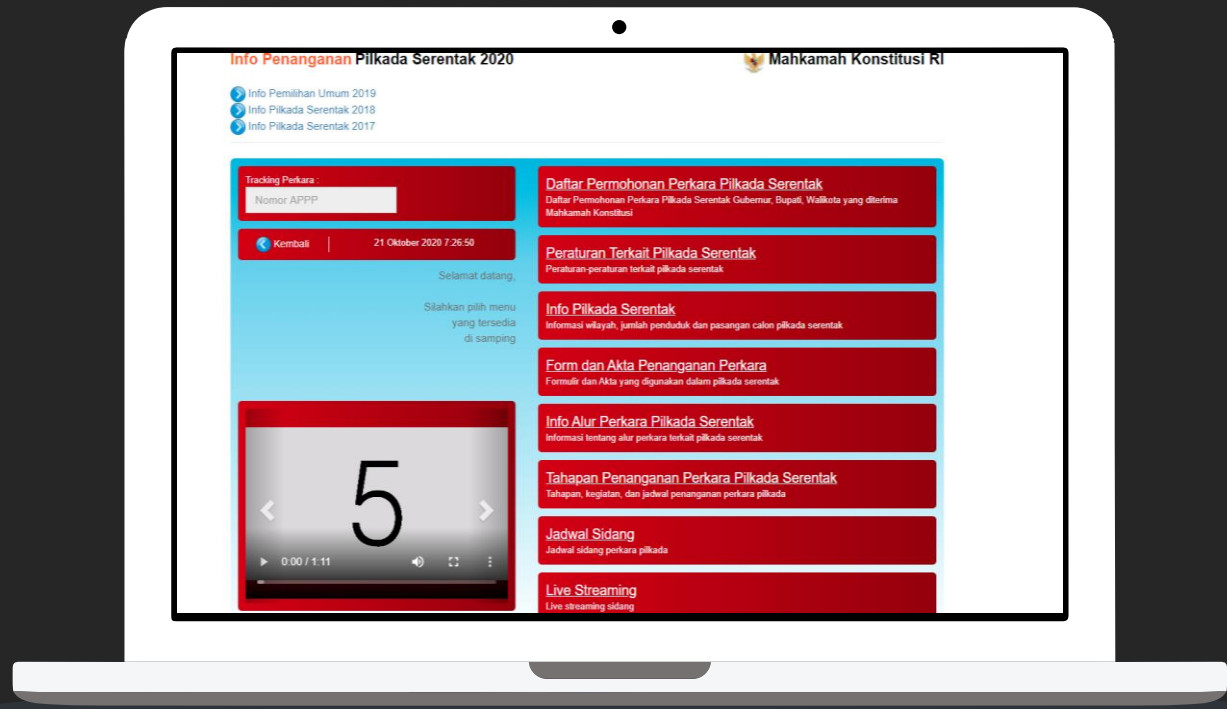
Pengujian Undang Undang ▶ PUTAR SEMUA

Subscription List:

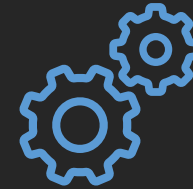
- Joma Tech
- Huw Richards
- Najwa Shihab
- The Ripe Tomato F...
- Daftar5
- StatQuest with Josh ...
- Kim May



Portal Informasi Pilkada 2020



Dapat di akses di
laman MK



Memberikan
informasi
seputar Pilkada
2020

CONTOH PORTAL INFORMASI PILKADA 2018

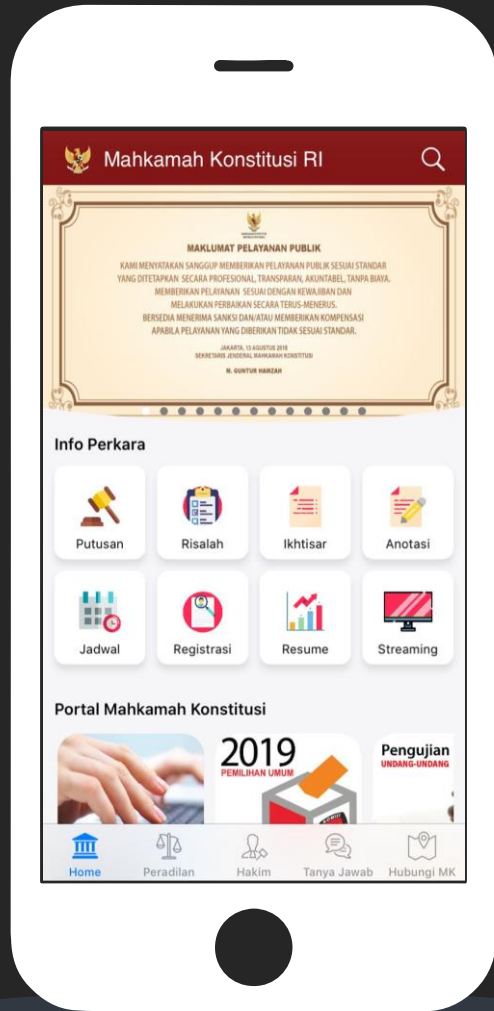
[Home](#) | [Peraturan](#) | [Permohonan Online](#) | [Daftar Permohonan](#) | [Info Wilayah](#) | [Form](#)

 **Mahkamah Konstitusi RI**

[Dan Akta](#) | [Alur Perkara](#) | [Tahapan](#) | [Jadwal Sidang](#) | [Streaming](#)


Daftar Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2018

NO	TANGGAL	PERMOHONAN/PERKARA	PARA PIHAK	KUASA	FILE	PUTUSAN
1	Kamis, 05 Juli 2018 10:14:00 WIB	PHP Walikota Tegal Tahun 2018 APPP Nomor : 1/1/PAN.MK/2018 Registrasi Nomor : 1/PHP.KOT-XVI/2018	<u>Pemohon:</u> K.H. Habib Ali Zaenal Abidin, S.E. dan Tanty Prasetyoningrum	<u>Kuasa Pemohon:</u> Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA., F.A. Fredyanto Hascaryo, S.H., M.H., dkk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan 2. Permohonan 3. APL & DPKP2 4. Permohonan diregistrasi 5. Perbaikan Permohonan 6. Keterangan Bawaslu 7. Perbaikan Permohonan 8. Jawaban Termohon 9. Keterangan Pihak Terkait 	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
			<u>Termohon:</u> KPU Tegal	<u>Kuasa Termohon:</u> Ali Nurdin, S.H. S.T.		
			<u>Pihak Terkait:</u> H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M. dan Muhammad Jumadi, S.T., M.M. (Nomor Urut 3)	<u>Kuasa Pihak Terkait:</u> R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dkk.		
2	Jumat, 06 Juli 2018 14:27:00 WIB	PHP Walikota Pare-Pare Tahun 2018 APPP Nomor : 2/1/PAN.MK/2018 Registrasi Nomor : 2/PHP.KOT-XVI/2018	<u>Pemohon:</u> DR. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, S.E., M.M. dan Asriady Samad, A.Md.	<u>Kuasa Pemohon:</u> Andi Lilling, S.H., dkk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan 2. Permohonan 3. APL & DPKP2 4. Permohonan diregistrasi 5. Keterangan Pihak Terkait 6. Keterangan Bawaslu 7. Jawaban Termohon 8. Kesimpulan 	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
			<u>Termohon:</u> KPU Pare-Pare	<u>Kuasa Termohon:</u> Marhumah Majid, S.H., M.H dkk		
			<u>Pihak Terkait:</u> Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim (Nomor Urut 1)	<u>Kuasa Pihak Terkait:</u> Anwar, S.H. dkk		

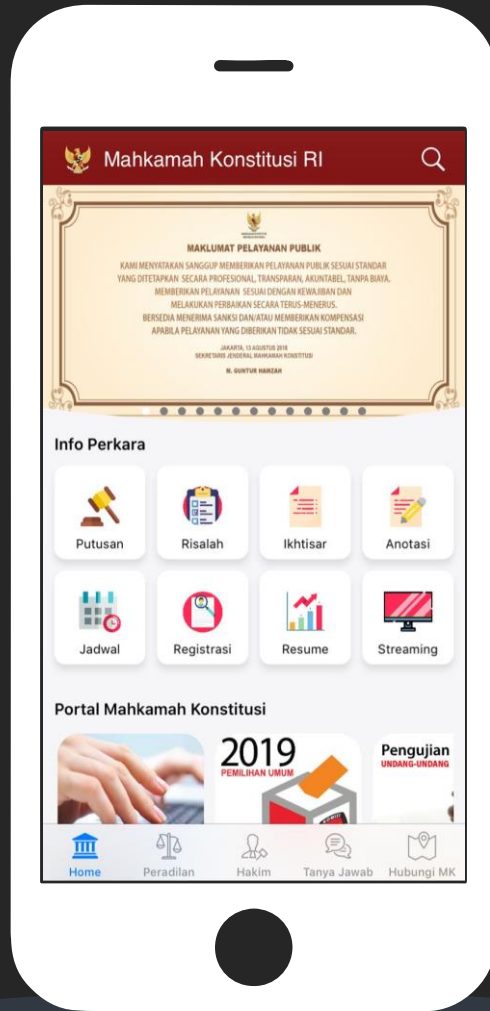


CLICK MK

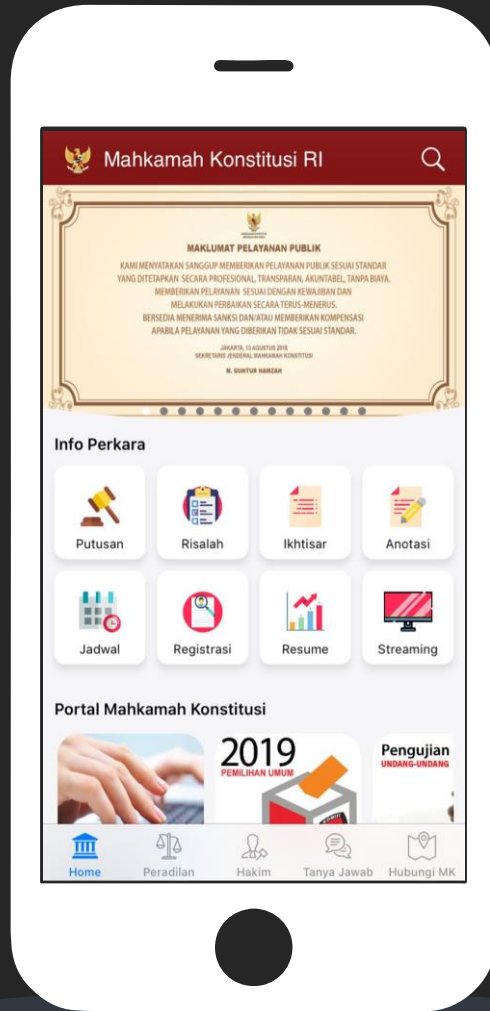


Download on the  and 

CLICK MK Versi Android



CLICK MK Versi IOS



Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference, Zoom)



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (*VIDEO CONFERENCE*)

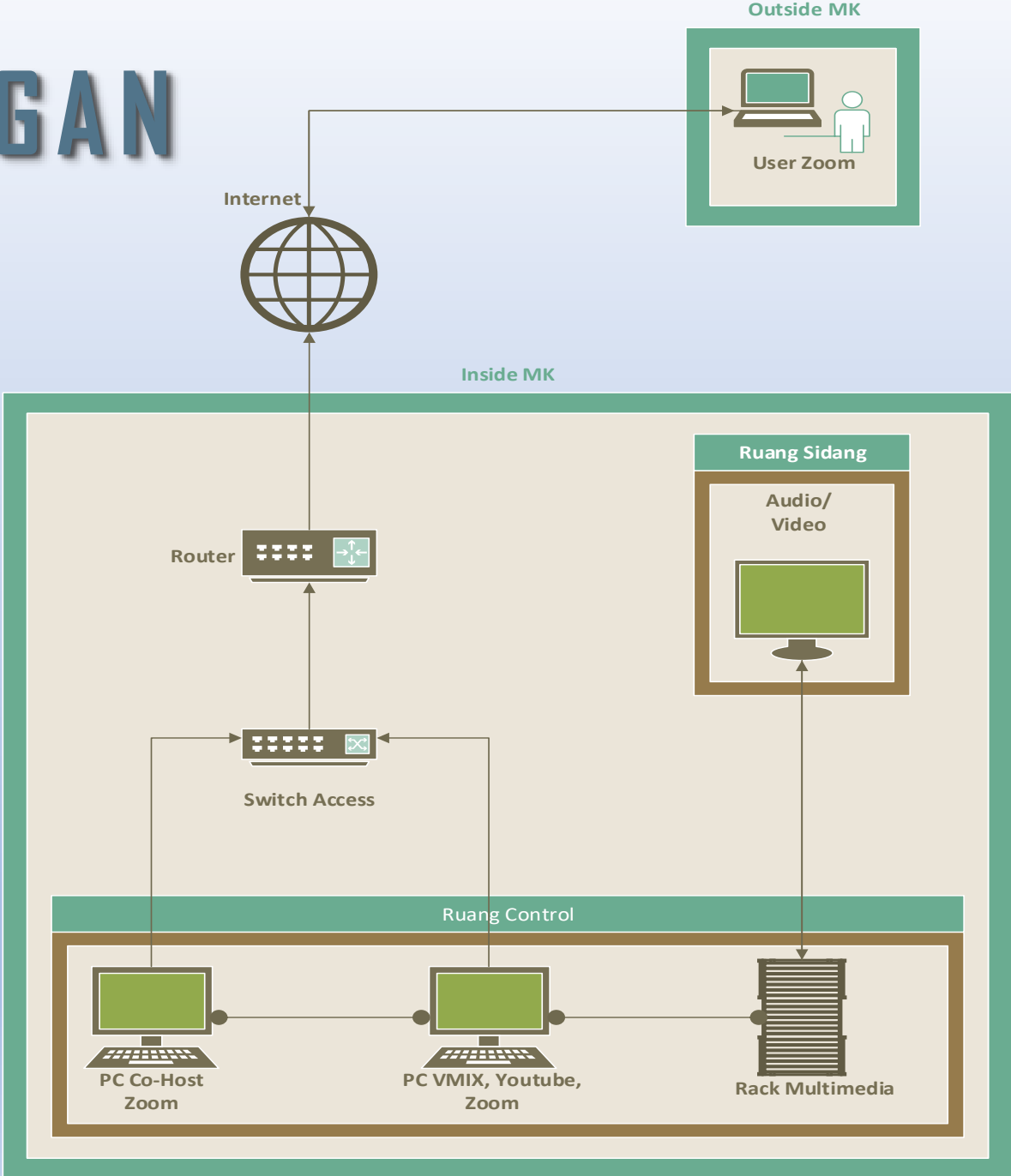
Dalam rangka penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan antara lain dengan melaksanakan persidangan jarak jauh, yaitu:

- a. mempermudah masyarakat pencari keadilan dan stakeholder mengikuti proses persidangan dalam arti tidak selalu harus hadir secara fisik ke ruang sidang MK,
- b. menekan biaya persidangan bagi masyarakat pencari keadilan dalam arti biaya yang akan ditanggung oleh masyarakat pencari keadilan cukup ringan.

PMK 18/2009 Pasal 16 ayat (3)

“Pemeriksaan persidangan jarak jauh adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap pemohon dan/atau termohon maupun kuasanya, saksi dan/atau ahli yang dilakukan secara online dan real time (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi video conferencing dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan secara offline.”

TOPOLOGI PERSIDANGAN



PERSIDANGAN VIRTUAL



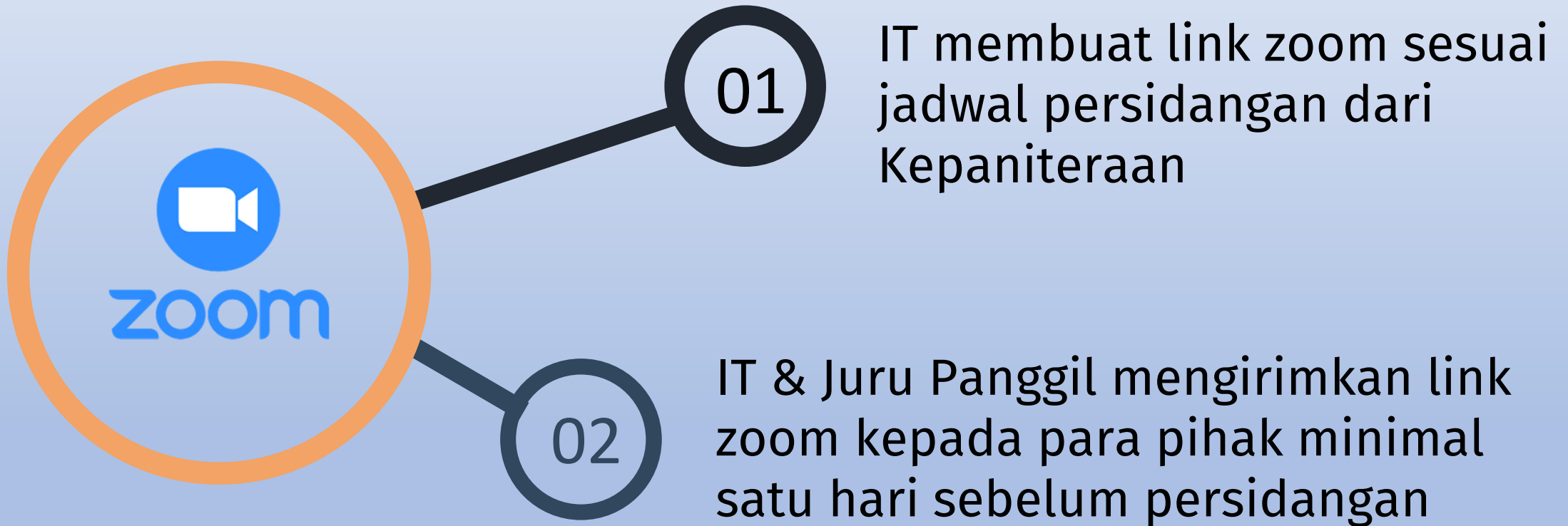
You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi



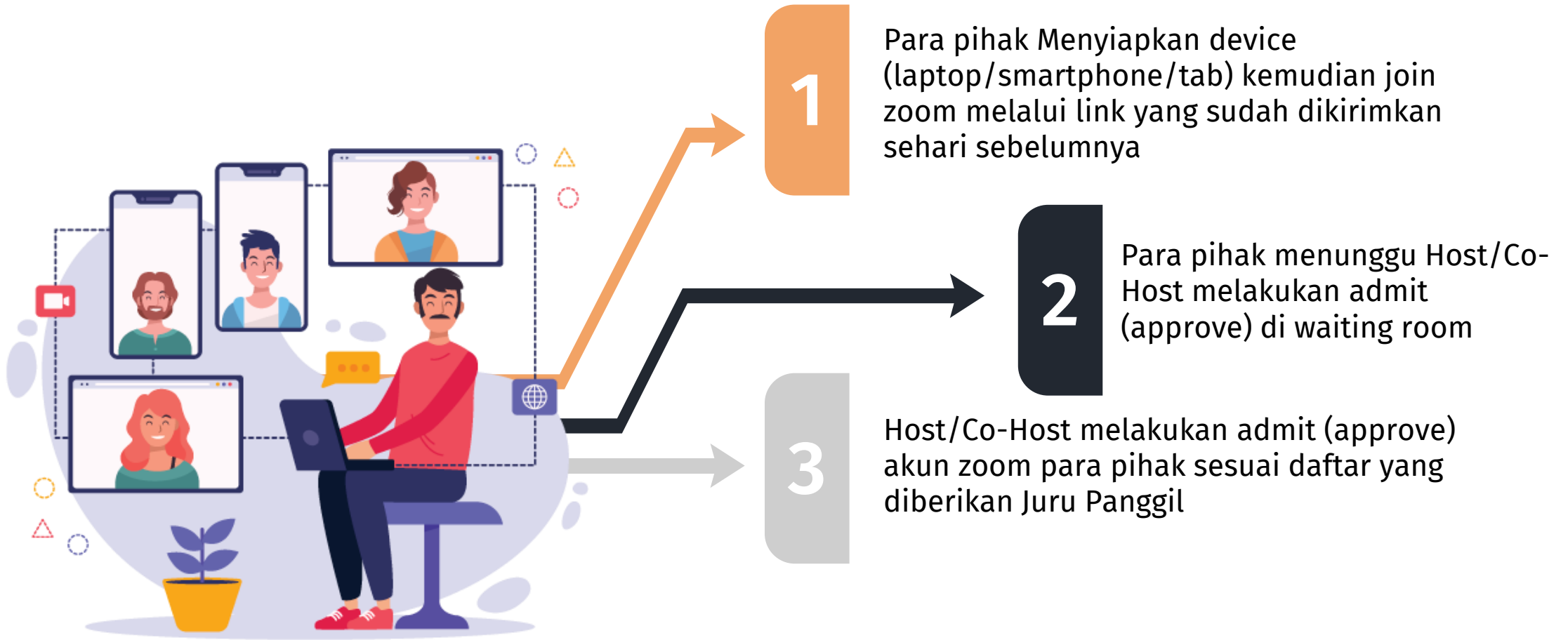
MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi

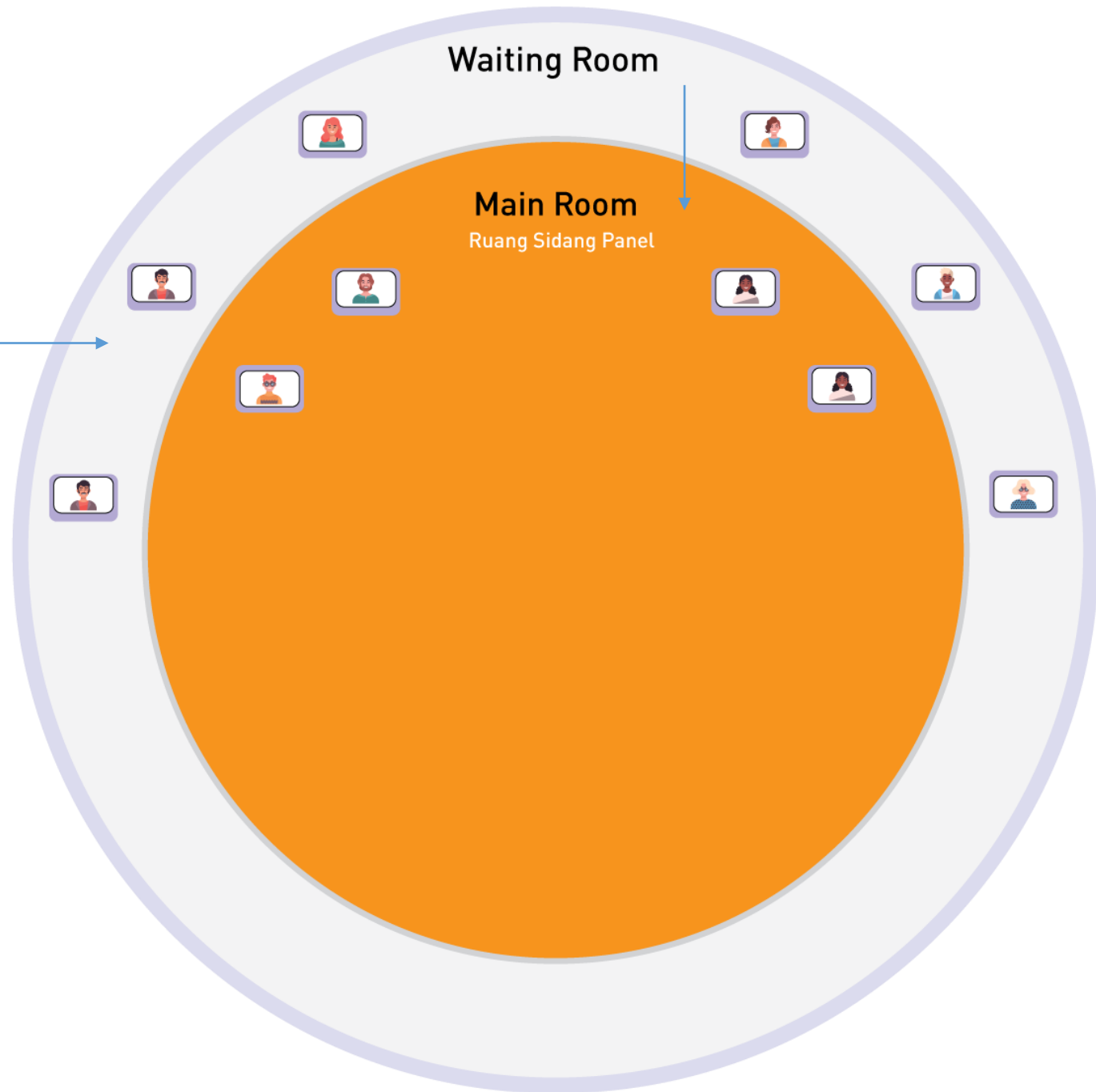
PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (ZOOM)

Tahap Persiapan



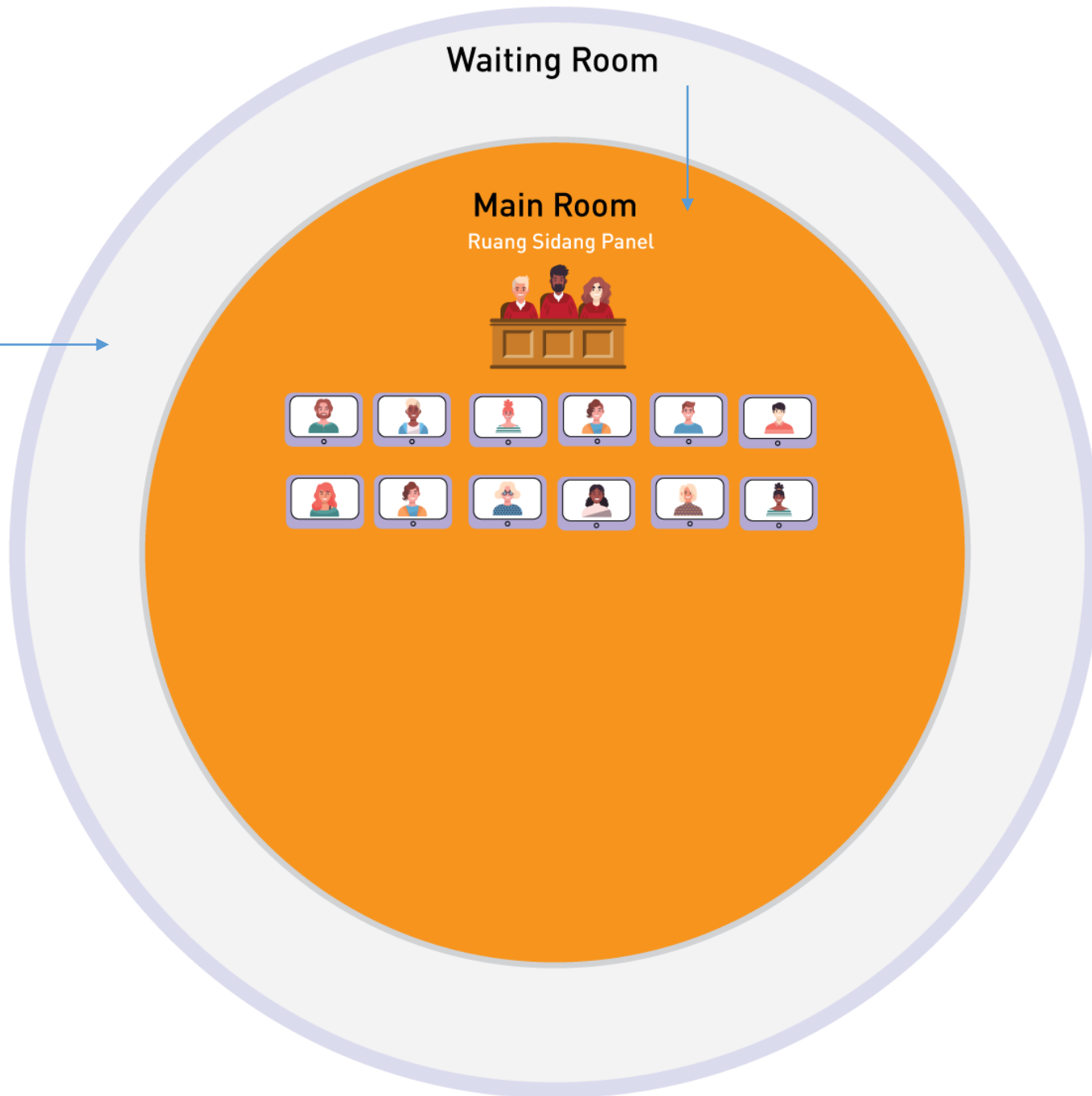
Alur Persidangan Online





Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**

Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan

PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (VIDEO CONFERENCE)

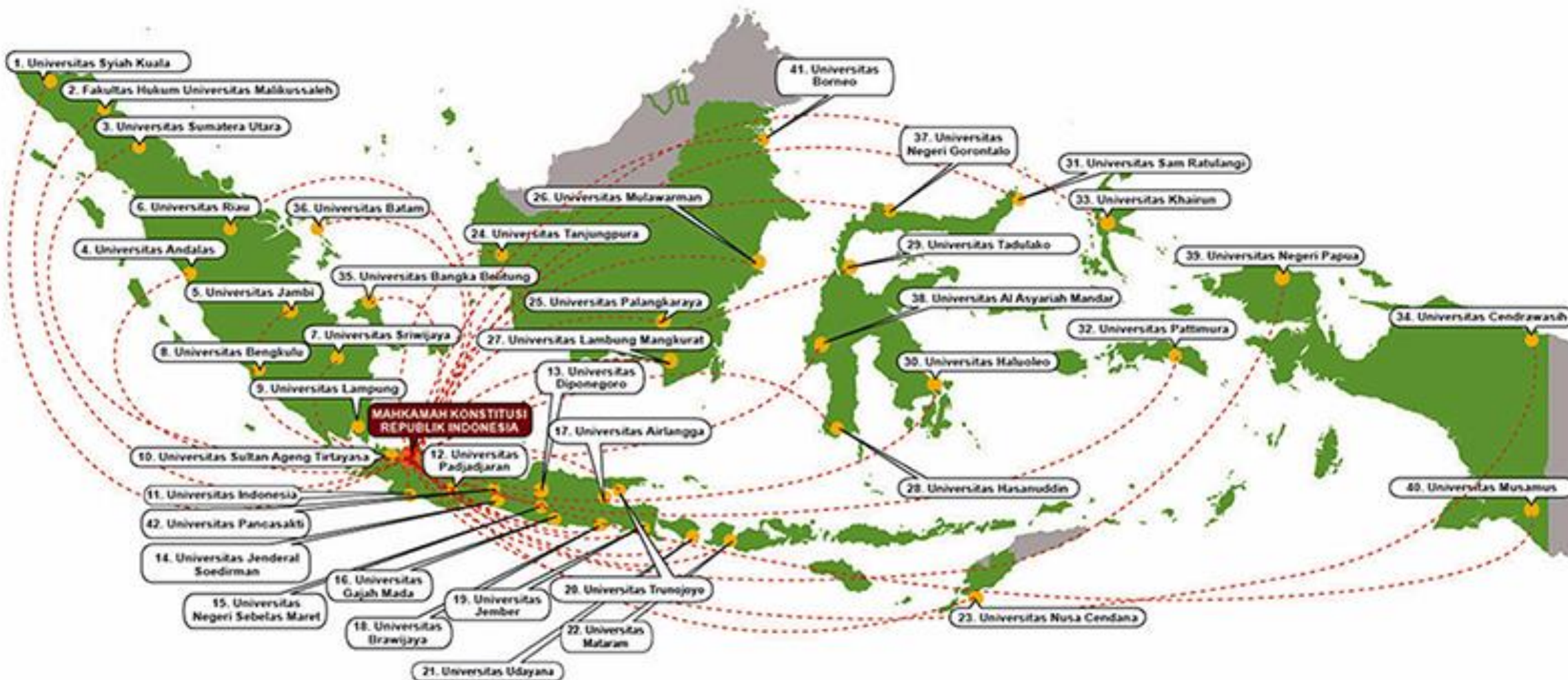
NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
1	FH Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam	12	FH Universitas Padjadjaran	Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung , Jawa Barat 40132
2	FH Universitas Malikussaleh (Provinsi Aceh)	Kampus Bukit Indah, Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141	13	FH Universitas Diponegoro (Jawa Tengah)	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214
3	FH Universitas Sumatera Utara	Jl. Universitas No.4 Padang Bulan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155	14	FH Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
4	FH Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat	15	FH Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
5	FH Universitas Jambi (Kampus Pinang Masak)	Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 363631	16	FH Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
6	FH Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau	17	FH Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
7	FH Universitas Sriwijaya (Sumatera Selatan)	Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km.32 Inderalaya Ogan Ilir30661	18	FH Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	FH Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A	19	FH Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
9	FH Universitas Lampung	Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145	20	FH Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
10	FH Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Raya Jakarta Km.4 Pakupatan, Serang Banten	21	FH Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
11	FH Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat	22	FH Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

PERGURUAN TINGGI		ALAMAT	NO	PERGURUAN TINGGI	ALAMAT
23	FH Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur	33	FH Universitas Khairun (Ternate)	Kampus II Kelurahan Gambesi, Jl. Raya Pertamina KotaK Pos 53 Ternate 97719
24	FH Universitas Tanjungpura	Jl. Jenderal Achmad Yani/Jl. Sosiologi Pontianak Kotak Pos 1049 Kalimantan Barat	34	FH Universitas Cenderawasih	Jl. Kamp Wolker Kampus Baru Waena - Jayapura - Papua 99358
25	FH Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah	35	FH Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
26	FH Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119	36	FH Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
27	FH Universitas Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan)	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123	37	FH Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
28	FH Universitas Hasanudin (Sulawesi Selatan)	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Tamalanrea, Makasar 90245	38	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Polewali, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
29	FH Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako Tondo, Jl. Soekarno Hatta KM.9, Palu Sulawesi Tengah - 94118	39	Universitas Negeri Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
30	FH Universitas Haluleo (Sulawesi Tenggara)	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari 93232	40	FISIP Universitas Musamus	Jl. Kamizaun Mopah Lama Merauke
31	FH Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115	41	FH Universitas Borneo	Jl. Amal Lama No 1, Tarakan Kalimantan Utara PO. BOX 170
32	FH Universitas Patimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon	42	FH Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal, Jawa Tengah

Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



Pelayanan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*)



Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan

6 Agustus 2018

Pemanfaatan lain dari fasilitas *Video Conference*



Kuliah Umum /
General Lecture
dan Symposium
Nasional /
International



Tanda Tangan Elektronik

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jin. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkr.lid

Keterangan:

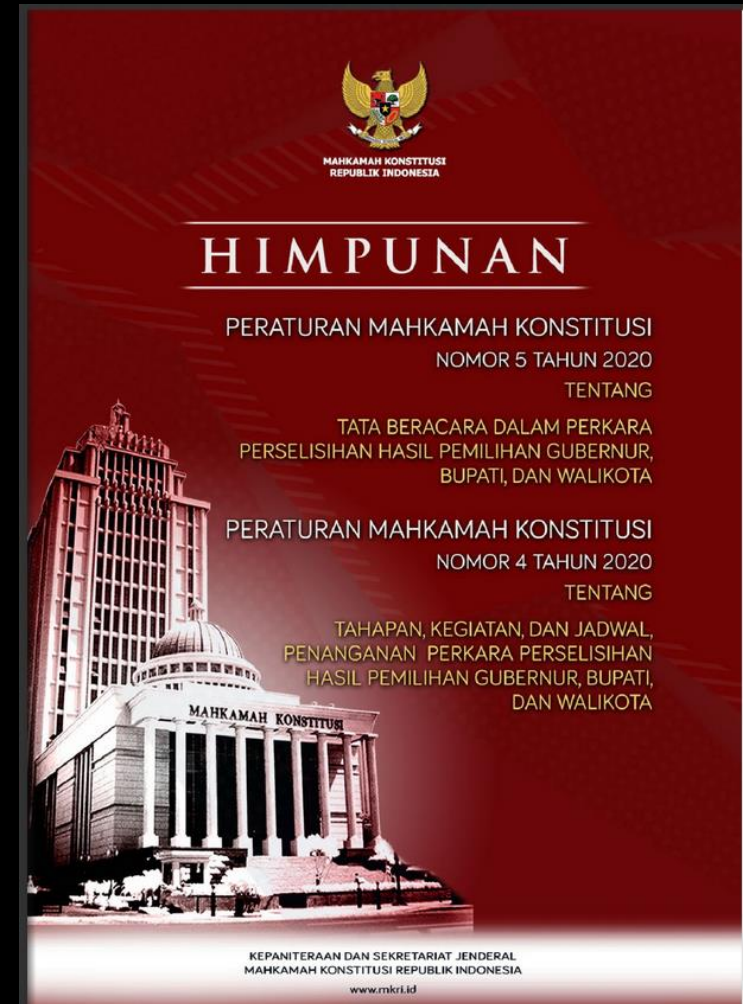
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

Ebook Himpunan Peraturan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada

online.fliphtml5.com/zqllp/wcne



QRCode



TERIMA KASIH